

ASWAJA (AHL SUNNAH WAL JAMAAH), NU DAN NEGARA ISLAM ¹

Oleh : Nurrohman ²

Latar belakang historis munculnya Aswaja

Berbicara tentang ahl sunnah wal jamaah , sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari pembicaran seputar hubungan politik dengan agama. Sebagaimana diketahui bahwa pertikaian politik sepeninggal rasulullah telah mengakibatkan umat Islam terpecah belah menjadi beberapa faksi atau golongan.

Pertikaian yang terjadi semasa dua khalifah pertama yakni Abu Bakar dan Umar, tampak masih bisa diselesaikan. Tetapi pada saat Umar digantikan oleh Usman, ia tidak bisa mengendalikan keadaan. Usman dinilai ‘nepotis’ karena gubernur-gubernur yang diangkat Umar, kemudian diganti dengan kerabatnya. Hal ini mengakibatkan munculnya perasaan tidak senang di daerah-daerah. Penggantian gubernur Mesir ,Umar bin Ash, dengan Abdullah ibn Saad, salah satu anggota keluarga Usman, mengakibatkan lima ratus pemberontak bergerak menuju Madinah. Dalam pemberontakan itu Usman akhirnya terbunuh.

Naiknya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat ternyata tidak mulus. Tantangan pertama datang dari mereka yang sebenarnya ingin menjadi khalifah seperti Talhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah, istri nabi. Ali dapat memenangkan pertempuran yang terjadi di Irak tahun 656 antara dirinya dengan Aisyah yang didukung oleh Talhah dan Zubair.

Tantangan kedua datang dari Muawiyah, gubernur Damaskus yang juga keluarga dekat Usman. Muawiyah menuntut Ali supaya menghukum pembunuh-pembunuh Usman, bahkan ia menuduh Ali turut campur dalam soal pembunuhan itu. Sebab salah tokoh seorang pemberontak yang kemudian membunuh Usman, yang bernama Muhammad ibn Abi Bakr adalah anak angkat Ali bin Abi Thalib.

Akhirnya pertempuran antara Ali dan Mu’awiyah juga tak bisa dihindari. Dalam kondisi terdesak, Muawiyah, melalui kepercayaannya Amr bin Ash minta berdamai dengan mengangkat al-Qur’an keatas. Atas desakan beberapa pihak, Ali menerima tawaran untuk berunding. Sebagai pengantara diangkat Amr bin Ash dari pihak Mu’awiyah dan Abu Musa al-Asy’ari dari pihak Ali. Akan tetapi perundingan ini hanyalah siasat untuk mengukuhkan Mu;awiyah dan menjatuhkan Ali. Keputusan ini jelas ditolak oleh pihak Ali. Meskipun Ali tidak mau meletakkan jabatannya , tapi tentaranya kemudian pecah, sehingga Ali menghadapi dua musuh, pertama , Muawiyah, kedua tentara yang memisahkan diri yang kemudian dikenal dengan sebutan Khawarij. Khawarij menuduh Ali kafir ,karena menerima perundingan, tidak berhukum dengan hukum Allah. Ali telah berbuat dosa besar dan orang berbuat dosa besar berarti kafir. Tidak hanya Ali, tapi mereka yang terlibat dalam perundingan dianggap kafir dalam arti murtad sehingga mereka mesti dibunuh.

Dari persoalan persoalan politik kemudian beralih ke persoalan teologi dengan mempersoalkan dosa besar. Persoalan dosa besar ini melahirkan tiga aliran , Khawarij, Murji’ah dan Mu’tazilah. Kemudian muncul persoalan lain, apakah manusia sebenarnya memiliki kebebasan kehendak dan kebebasan berbuat, *free will* dan *free act* . Dari sini kemudian lahir aliran *jabariyah* dan *qadariyah*. Aliran-aliran ini terus berkembang dan bercabang.

Aliran Mu’tazilah yang berkembang menjadi aliran rasional mengalami masa kejayaan dan sempat menjadi aliran resmi negara pada masa khalifah al-Ma’mun (813-833 M). Akan tetapi karena aliran ini dipaksakan oleh negara maka menimbulkan perlawanan dan tampillah Abu Hasan al-Asy’ari (935 M) dan Abu Mansur al-Maturidy (w.944M) untuk mengimbangnya. Aliran Asy’ariyah dan Maturidiyah inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Ahl al-Sunnah wal Jamaah.

Mengapa aliran ini disebut Ahl al-Sunnah wal Jamaah ? Karena sesuai dengan namanya , kelompok inilah yang mempertahankan atau yang lebih terikat dengan teks hadits sehingga disebut ahl al sunnah, dan

¹ Disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh ASWAJA Center yang diselenggarakan di kantor PWNU Jl.Galunggung Bandung pada tanggal 20 September 2014

² Wakil Ketua LBM –PWNU Jawa Barat.

juga lebih akomodatif atau lebih bisa merangkul sebagian besar umat Islam pada waktu itu karena tidak mau mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar.

Hakikat aswaja

Hakikat aswaja adalah sebuah aliran yang ingin menjadikan Nabi atau sunnah Nabi sebagai orientasi hidup (ahlussunah) dan bersikap akomodatif serta inklusif (wal Jamaah). Aswaja sebenarnya merupakan pola hidup, pola pikir, pola sikap berikut: 1) ingin menjadikan sunnah atau tradisi nabi sebagai pedoman hidup 2) ingin mengembangkan sikap yang inklusif dan akomodatif dalam menghadapi berbagai paham atau aliran dalam Islam dan 3) memandang perbedaan sebagai suatu yang positif atau dengan kata lain menghormati pluralitas, sesuai dengan hadits *ikhthilafu ummati rahmat*. Dengan karakter seperti ini maka dengan sendirinya aswaja selalu menggambarkan mayoritas umat Islam yang bersikap moderat.

Jadi walaupun ada kelompok yang ingin menjadikan sunnah atau tradisi nabi sebagai pedoman hidup tapi sikapnya eksklusif tidak mau mengakomodir kelompok yang berbeda maka tidak tepat bila mereka disebut *ahl sunnah wal jamaah*.

Sikap politik aswaja (sunni)

Sejalan dengan pandangan teologinya, *ahl sunnah wal jamaah* atau yang lebih dikenal sebagai kelompok Sunni cenderung akomodatif dan realistis. Artinya teori politik aswaja selalu bisa disesuaikan dengan perkembangan realitas politik yang terjadi di masyarakat. Misalnya, meskipun Mu'awiyah pernah berperang melawan Ali bin Abi Thalib, namun pada saat Ali bin Abi Thalib wafat, dan kekuasaan secara de facto ada di tangan Muawiyah maka Mu'awiyah diterima sebagai khalifah yang sah. Perbedaan atau bahkan pertikaian para sahabat dipandang sebagai hasil ijtihad masing-masing sehingga walaupun ijtihadnya tidak tepat, mereka masih dapat satu pahala. Kelompok Sunni tidak memperuncing pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat Nabi.

Sikap akomodatif politik Sunni tampaknya didasarkan atas prinsip bahwa : selama umat Islam masih bisa menjalankan syari'at agamanya, maka beragam bentuk pemerintahan semuanya bisa diterima. Itulah sebabnya , dalam menghadapi penguasa dzalim, yang tidak ideal, kelompok ini dalam sejarah cenderung menghindari pemberontakan. Mereka tidak mau serta merta menggulingkan penguasa dzalim selama ia masih bisa memelihara keamanan dan ketertiban umum. Penguasa dzalim boleh dikritik dan mesti dinasehati tapi tidak harus digulingkan.

Aswaja dan NU

NU adalah organisasi keagamaan yang lahir tahun 1926 yang bermaksud untuk melanjutkan atau mempertahankan paham keagamaan Ahl sunnah wal jamaah. Sebagai organisasi keagamaan, NU berusaha mengembangkan paham keagamaan yang ingin menjadikan Nabi atau sunnah Nabi sebagai orientasi hidup (ahlussunah) dan bersikap akomodatif dan inklusif (wal Jamaah). Akan tetapi sifat akomodatif NU dalam konteks Indonesia tidak hanya diartikan sebagai akomodatif terhadap perbedaan paham teology tapi juga akomodatif terhadap tradisi lokal.

Pada saat muncul aliran keagamaan yang berusaha membersihkan atau memurnikan perilaku agamanya dari tradisi lokal , NU justru berusaha mengakomodir tradisi lokal dengan memberinya ruh atau nilai-nilai Islam. Itulah sebabnya NU sering disebut sebagai ormas keagamaan yang bersifat tradisionlis. Meskipun NU dikenal sebagai ormas yang menganut paham tradisional tapi bukan berarti tidak menerima pembaharuan. Sambil mempertahankan tradisi yang baik NU juga bisa menerima sesuatu yang baru yang lebih baik. NU terkenal dalam memelihara jargon *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wal ahdzu bil jadid al-ashlah*.

Spirit aswaja itulah yang akan diestarkan oleh NU. Oleh karena itu meskipun NU membuat rumusan aswaja sendiri, tetapi rumusan normative yang dibuat oleh NU tentang aswaja, tidak harus dipahami secara kaku dengan tanpa mempertimbangan aspek historis dan filosofis dari kemunculan aswaja.

NU dan wawasan kebangsaan

Penghargaan terhadap kondisi lokal ini pula yang menjadikan NU sejak lahir telah meleburkan diri dalam gerakan kebangsaan atau keindonesiaan. Ada tiga gerakan yang mendahului kelahiran NU yakni: Gerakan kebangkitan bangsa (*nahdlatul wathan*), gerakan kebangkitan ekonomi (*nahdlatul tujjar*), dan gerakan mencerdaskan kehidupan bangsa (*tashwirul afkar*). Spirit inilah yang menjadikan NU relative tidak mengalami kesulitan saat memutuskan untuk menerima dan menjadikan Pancasila sebagai ideology Negara final,³ bukan sasaran antara sebagai batu loncatan, bagi umat Islam Indonesia.

Sikap politik NU terhadap gagasan Negara Islam atau *khilafat*

Sikap politik NU tampak sejalan dengan sikap politik sunni pada umumnya yang realistis. Itulah sebabnya pada saat banyak kritik bahkan ada upaya penggulingan presiden Sukarno, NU secara realistis mengakui Sukarno sebagai penguasa de facto atau yang dikenal dalam istilah fiqh siyasah *waliyul amri dlarury bi al-syaukah*. Sejalan dengan sikapnya yang inkulif dan akomodatif, NU tidak sejalan dengan gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan tafsirannya yang radikal. Para ulama berbeda-beda dalam merumuskan apa itu Negara Islam (*darul Islam*) atau khilafat.⁴ NU sesuai dengan karakteristiknya yang moderat, inklusif dan akomodatif, tentu lebih memilih tafsiran yang juga moderat ketimbang tafsiran yang kaku, ekstrim dan radikal.⁵

Tantangan aswaja kedepan

Sesuai dengan sikapnya yang berusaha mengikuti pola Nabi, akomodatif dan bisa menerima perbedaan, maka tantangan aswaja pertama adalah bagaimana menempatkan nabi sebagai *uswatun hasanah* dalam konteks kekinian. Tantangan ini tidak mudah karena disamping memerlukan pemahaman

³ Setidaknya ada tiga alasan untuk menerima Pancasila; 1) secara historis, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan perjanjian luhur dari seluruh bangsa. Oleh karena itu kedudukan Pancasila dan UUD 1945 mirip dengan mitsaq (perjanjian) Madinah atau yang juga dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Keduanya sama-sama merupakan hasil kesepakatan antara berbagai suku dan agama yang plural. 2) Meskipun Pancasila tidak dibuat atau dirumuskan oleh mujtahid dalam pengertian ulama fiqh dan tidak digali langsung dari al-Qur'an atau al sunnah, tetapi Pancasila telah dinilai oleh ulama Indonesia sejalan dengan jiwa syari'at Islam. 3) Sejak tahun 1985 Pancasila telah diterima oleh bangsa Indonesia, khususnya oleh NU, sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat.

⁴ Imam Abu Yusuf (w.182 H.) tokoh terbesar madzhab Hanafi berpendapat bahwa suatu negara disebut *dar al-Islam* bila hukum Islam bisa diamalkan didalamnya. Al-Rafi'I (w.623H), salah seorang tokoh madzhab Syafi'I, lebih menekankan pada pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Suatu negara dipandang sebagai *dar al-islam* apabila dipimpin oleh seorang muslim. Abu Hanifah (80-150 H) lebih menekankan pada rasa aman yang dinikmati penduduknya. Bila umat Islam atau umat beragama lain merasa aman dalam menjalankan aktifitas agamanya, maka negara tersebut termasuk *dar al-Islam*.

⁵ Pidato M.Natsir mantan Perdana Menteri Republik Indonesia di Pakistan Institute of International Affairs pada tanggal 2 April 1952 sebagai berikut: *Pakistan is decidedly an Islamic country by population and by choice as it has declared Islam as the state's religion. So is Indonesia an Islamic country by the fact that Islam is recognized as the religion of Indonesian people, though no expressed mention is made in one constitution to make it the state's religion. But neither has Indonesia excluded religion from statehood. In fact it has put the monotheistic creed in the one and only God, at the head of the Pantjasila- The fives principles- adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of the state and the nation. Thus for both our countries and peoples Islam has its very essential place in our lives, which does not mean, however, that our state-organization is theocratic.*

tentang kondisi sosio historis dimana Nabi diutus, juga memerlukan pemahaman tentang mana misi utama nabi dan mana kebijakan nabi yang bersifat temporal dan kontekstual.

Tantangan kedua adalah bagaimana mengelola perbedaan baik perbedaan dalam cara memahami agama maupun perbedaan dalam menyikapi kondisi politik tertentu sehingga perbedaan itu tidak melahirkan konflik dan pertumpahan darah di antara umat Islam sebagaimana pernah terjadi di masa lalu dan masih sering terjadi juga di masa kini.

Penutup

NU akan tetap menjadi besar andaikata bisa terus memelihara prinsip-prinsip aswaja yang telah menjadi jati dirinya dan sebaliknya akan menjadi kecil bila gagal memegang teguh prinsipnya sendiri. Selama ini kebesaran NU bukan karena kecanggihan organisasinya tapi lebih karena prinsip dasar yang menjadi pandangan hidupnya. Umat Islam, khususnya warga NU mesti bangga bisa ikut dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia. Meskipun system demokrasi yang dianut oleh Indonesia masih mengandung sejumlah kelemahan tapi demokrasi kalau sudah terkonsolidasi dengan baik sebenarnya bisa dijadikan alat untuk mengelola manajemen konflik politik tanpa kekerasan.